



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

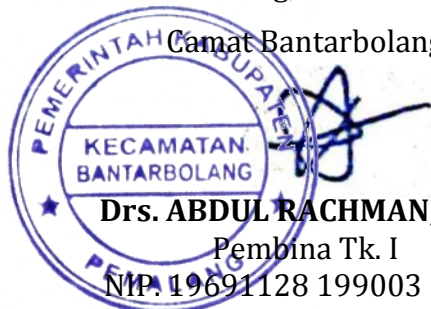
Puji syukur kehadirat Alloh SWT dan atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah -Nya sehingga Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah menyusun Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 ini disamping sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Bantarbolang sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang.

Kami menyadari bahwa Renja ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Bantarbolang, 2021

Camat Bantarbolang

Drs. ABDUL RACHMAN, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4 / 533 / TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, maka perlu dilaksanakan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018–2038;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

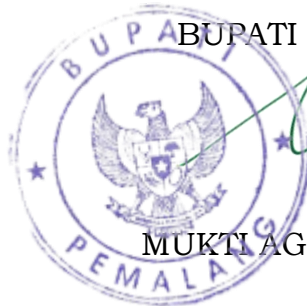
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 serta sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 21 September 2021

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 188.4 / 533 /TAHUN 2021

TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

DAFTAR RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Bappeda
23. Bapenda
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik

BUPATI PEMALANG,

MUKTIAGUNG WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

Nomor : 050 / / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bantarbolang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
18. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya ;
19. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang Jaya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:
- a. mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan dalam penyusunan Renja PD;
 - b. melakukan penyusunan Renja PD;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim sebagai

bahan masukan;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Bantarbolang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantarbolang
pada Tanggal : September 2021



CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19691128 199003 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ;
2. Kepala BKAD Kab. Pemalang ;
3. Kepala Bappeda Kab. Pemalang ;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan ;
6. A r s i p .

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

NOMOR : 050/ 8 / TAHUN 2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Camat Bantarbolang	Penanggungjawab	Drs. Abdul Rachman, M.Si
2	Sekcam	Ketua	Nur Aziz Muhaimin, SH
3	Kasubbag Binprokeu	Sekretaris	Andi Susanto, S.IP
4	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota	Andi Supriharto
5	Kasi PMD	Anggota	M. Nurzaidin, S.IP, M.Si
6	Kasi Pelayanan	Anggota	Sukmono, SH
7	Kasi Trantibum	Anggota	Sri Budi Priyanto, BA
8	Kasubbag Umum dan Kepeg.	Anggota	Agus Dwi Setiarjo
9	Pelaksana	Anggota	Sutarso
10	Pelaksana	Anggota	Fatchrur Roji

CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	1
PERATURAN CAMAT BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG	
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
..... 13	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	46
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	47
3.3. Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
BAB V PENUTUP	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Lampiran : Peraturan Camat Bantarbolang
Nomor : TAHUN 2021
Tanggal : 01 AGUSTUS 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA-PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah dan telah disahkan dengan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 pada tanggal 4 Agustus 2020, namun beriring waktu berjalan Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 dilakukan perubahan karena adanya beberapa hal, antara lain :

1. Penyesuaian/rasionalisasi belanja daerah karena realisasi SiLPA tahun 2020 lebih rendah dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021
 2. Rasionalisasi dan *refocussing* anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya
 3. Penyesuaian target kinerja di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021
-

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja PD Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021, berlandaskan pada :

1. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Renja 2021;
2. Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2021

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA PD.

Atas dasar itu maka Perubahan Renja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan PD dan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang mengapa Perubahan Renja PD dilakukan

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang aturan/pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

2.1. Evaluasi perubahan renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Berisi gambaran pelayanan PD berdasarkan indikator tujuan & sasaran program dengan melakukan penghitungan antara anggaran penetapan 2021, anggaran refocusing 1 dan anggaran refocusing 2.

2.2. Persandingan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.

Berisi tentang persandingan program/kegiatan dari Permendagri No 13 Tahun 2016 dengan Permendagri No 90 Tahun 2019.

2.3. Realisasi capaian kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2021 sampai tahun 2021 sampai triwulan II.

Berisi status realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melihat interval nilai realisasi kinerja kriteria penilaian realisasi kinerja PD.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2021

Bab V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi perubahan renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Kecamatan Bantarbolang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bantarbolang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

Kecamatan Bantarbolang juga mempunyai tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai perangkat daerah yang

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

Sedangkan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang selama tahun 2021-2026, adalah **“Meningkatnya pelayanan kecamatan”**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bantarbolang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantarbolang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	77,79	78	78	78	78	78	78	99,73
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	65,68	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	69,57	94,41

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya maka telah terjadi rasionalisasi dan refocussing anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dimana anggaran penetapan untuk Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp. 3.447.892.000 dan anggaran refocussing 1 sebesar Rp. 3.024.627.000 sehingga sampai dengan tri wulan II tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 0,80% dari anggaran refocussing 1.

2.2. Persandingan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.

Dari hasil evaluasi perubahan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2021 maka disandingkan program/kegiatan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 sesuai tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 PERSANDINGAN HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

Progra m/Ke giatan	Indika tor	Sa tu an	T ar get	Ang gar an (Rp)	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	T a r g e t	Ang gar an (Rp) Pe n e t a p an	Ang gar an (Rp) Refo cus ing	Realisasi								Capaian (%)		OPD		
											TW I		TW II		TW III		TW IV		Total			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
KECAMATAN BANTARBOLANG																							
PROG RAM PELAY ANAN ADMI NISTR ASI PERK ANTO RAN	Persen tase kebut uhan admini strasi perka ntoran	bu la n	1 2	498 .79 7.0 00	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Indeks Kepusa an Masyarak at	skor	7 8										-	-	0,0 0	Kec. Bant arbol ang		
Penye diaan jasa surat menyu rat	Jumla h surat terkiri m selam a 1 tahun	su rat	6 0	38. 550 .00 0		Indeks Reformas i Birokrasi	skor	1 0, 7 2	3.44 7.89 2.00 0	3.02 4.62 7.00 0	15. 52 0.0 00	8.7 76. 000							24. 296 .00 0	-		0,8 0	
						Nilai Sistem Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah	skor	4 4, 8 9	3.11 5.06 2.00 0	2.74 5.91 3.00 0													

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik kantor	jenis	3	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	9.925.000	9.925.000	100	100	0	-					100	1.047.200	100,00	10,55	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas empat roda dan dua yang diperpanjang pajaknya	unit	11	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	2.445.000	2.445.000	100	100	0	-	-					100	1.047.200	100,00	93,92
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	unit gedung	4	68.400.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000	-	-	-	-	-					0	-	-	0,00

	kebersihannya				SKPD																
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun	jenis	16	18.823.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000	-	-	-	-				0	-	-	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, jumlah penggandaan	lembar	30.876	8.569.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000	-	-	-	-				0	-	-	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik /penerangannya	unit gedung	4	7.000.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000	-	-	-	-				0	-	-	0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan kelengkapan Kantor yang tersedia	jenis	1	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	3.020.000	3.020.000	-	-	-	-	0	-	-	0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	1	2.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	2.190.370	1.967.078.000	100	2.000.000	8,52	996.510.136	149	998.510.136	149,00	50,76
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	2	3.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/bulan	174	2.185.890	1.962.598.000	0	-	174	995.583.536	174	995.583.536	100	1464,0934

Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai	jenis	3	124.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	-	-					1	2.000.000	1,00	0,60
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	kali	522	85.855.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD yang tersusun	dok	11	1.800.000	1.800.000	-	-	3	926.600					3	926.600	0,01	13,24
Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	unit gedung	4	96.600.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	680.000	680.000	-	-	-	-					0	-	-	0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana prasarana aparat untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	%	100	564.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas	%	100	355.660.000	334.576.000	25,50	63.722.600	48,99	155.031.000					74,50	218.753.600	74,50	2500,90
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	unit	2	70.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11/12	7.000.000	7.000.000	3/12	2.489.900	3/12	3.505.000					6/12	5.994.900	145,45	#DIV/0!
Pengadaan perlengkapan rumah	Jumlah perlengkapan rumah	jenis	3	10.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	3/12	278.000.000	278.000.000	1/12	52.191.500	1/12	126.973.000					2/12	179.164.500	66,67	5972,15

jabatan/dinas	jabatan/dinas yang disediakan																				
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	jenis	3	13.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia				8	2137200	15	4374000					23	6.511.200	76,67	#DIV/0!
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	jenis	1	500.000			buku	30	8.747.000	8.747.000											
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	jenis	2	20.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jenis surat kabar yang tersedia				112	500.000	112	1.250.000					212	1.750.000	2.260,00	7,28

Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan	jenis	3	40.000.000																		
Pengadaan komputer dan perlengkapan	Jumlah Komputer / Laptop, Printer dan Perlen lainnya	jenis	4	40.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	58.913.000	37.829.000	63	6.404.000	126	18.929.000					189	25.333.000	9.450.000	105,55
Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	jenis	2	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	105.000	24.029.000	0	-	100	24.000.000					100	24.000.000	100,00	99,88
Pengadaan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	jenis	3	10.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	81.050.000	29.000	-	-	-	-					-	-	0,00	

Pengadaan lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia	unit	5	15.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	24.000.000	24.000.000	-	-	2	24.000.000					2	24.000.000	100,00	100,00	
Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang dibangun	unit	1	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlaksanaan tugas	%	100	221.400.000	246.600.000	26,4	41,47	90,00	5,13	118,99	2,00				77,80	160,47	77,80	65,07
Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dibangun	unit	1	150.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	5.400.000	11.400.000	150	2.450.000	300	2.700.000					450	5.150.000	75,00	45,18	
Pemeliharaan rutin berkala	Jumlah rumah dinas yang	unit gedung	1	20.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah rekening jasa sumber daya yang	jenis/bulan	312	31.200.000	25.200.000	112	4.029.000	112	11.292.000					212	15.321.000	100,00	60,80	

a rumah dinas	dipelih ara				daya air dan listrik	dibayar tiap bulan																
Pemeli haraa n rutin berkal a gedun g kantor	Jumla h gedun g kantor yang dipelih ara	un it ge du ng	3	30. 000 .00 0	Penyediaa n jasa pelayana n umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan		1 4 / 1 2	184. 800. 000	210. 000. 000	1 4 / 2	35. 00 0.0 00	1 4 / 2	105 .00 0.0 00					1 4 / 1 2	140 .00 0.0 00	100 .00	66, 67
Pemeli haraa n rutin/ berkal a kenda raan dinas/ operas ional	Jumla h kenda raan dinas/ operas ional roda empat dan roda dua yang dipelih ara	un it	1	40. 000 .00 0	Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentas e ketersedi aan barang milik daerah yang memperl ancar pelaksan aan tugas	%	1 0 0	232. 655. 000	163. 705. 000	3 2 6 1	51. 00 1.2 00	5 0	100 .04 5.0 00					8 2 6 1	151 .04 6.2 00	82, 61	92 ,2 7
Pemeli haraa n rutin/ berkal a mebel eur	Jumla h meube leur kantor yang dipelih ara	un it	1 5	10. 000 .00 0	Penyediaa n Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas	Jumlah kendaraa n dinas yang berizin dan terpelihar a	unit	1 0	60.7 00.0 00	60.7 00.0 00	3	20. 12 6.2 00	5	28. 968 .00 0					8	49. 094 .20 0	80, 00	80, 88

					atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapan yang dipelihara	Jumlah komputer dan perlengkapan yang dipelihara	unit	21	10.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	25.000.000	25.000.000	11	10.800.000	17	13.147.000					28	23.947.000	87,50	95,79
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara	jenis	3	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit	3	126.880.000	57.930.000	-	-	1	57.930.000					1	57.930.000	33,33	100,00
Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor	unit	1	8.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan	unit	1	20.075.000	20.075.000	1	20.075.000	-	-					1	20.075.000	100,00	100,00

dan area publik kantor	yang dipelihara				kantor atau bangunan lainnya	lainnya yang terpelihara															
Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatasan lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatasan lingkungan kantor	unit	1	3.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	100	41.300	41.300	-	-	97,06	8.776.000				97	8.776.000	97,06	21,20
Rehabilitasi sedan/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	unit	1	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	100	12.240.000	12.240.000	0	0	50,00	3.120.000				50,00	3.120.000	50,00	25,49
Rehabilitasi sedan/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	unit	1	-	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	data	6	12.240.000	12.240.000	0	0	3	3.120.000				3	3.120.000	17,65	25,49

	litasi				n																
Rehabilitasi sedan/g/berat kendaraan dinas/operasional dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	unit	1	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	100	29.150.000	29.150.000	0	0	47,06	5.656.000				47,06	5.656.000	47,06	19,40
Program peningkatan kemampuan sistem pelayanan pencapaian kinerja dan keuangan	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahun	%	100	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin	650	11.550.000	11.550.000	-	0	0	0				-	-	-	0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan kinerja dan realisasi kinerja	laporan	1	10.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan DTKS yang disusun	dok	17	17.600.000	17.600.000	-	0	8	5.656.000				8	5.656.000	47,06	32,14
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	laporan	2	-																	

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	3.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	69.100	69.100									-	-	0,00	
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik & benar	%	100	40.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	%	100	34.600	59.100	33,3	20.750.000	0	0					33,3	20.750.000	33,33	35,10
Penyusunan database perencanaan SKPD	Jumlah dokumen data base perencanaan yang disusun	dokumen	1	-	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang	1	29.400	29.400	1	20.750.000	-	-					1	20.750.000	100,00	70,46

					h dan swasta di wilayah kerja kecamatan																
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	5	5.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	desa/keurahan	2	5.200.000	29.670.000	-	-	-	-							0,00
Penyediaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang diseleksi	kegiatan	1	35.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	jenis	1	34.530.000	10.060.000	0	0									0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Prosentase peningkatan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	%	100	292.775.000	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	12	34.500	10.060.000	0	0	7	10.060.000						10.060.000	-	64,82	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun	laporan	12	5.000.000	PROGRAM KOORDINASI KENTRAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	24,5	15.500	15.500	0	15.520.000	-	-						100	15.520.000	100,00	100,00

Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan tertangani	%	83	93.280.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	100	15.500	15.500	100	15.520.000	-	-					100	15.520.000	100,00	
Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Jumlah hari-hari besar nasional di tingkat Kecamatan/ Kelurahan	kegiatan	2	105.565.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	15.500	15.500	34	15.520.000	-	-					34	15.520.000	100,00	
Pembinaan penguna dana ADD dan Dana Desa	Jumlah laporan penguna ADD dan Dana Desa yang tersus	laporan	12	89.80.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	123.565.000	69.449.000										-	-	0,00

	un																				
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah laporan LPPDesa yang tersusun baik dan benar serta tepat waktu	laporan	17	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	100	123.565.000	69.449.000	0	0	28,57	9.000.000					28,57	9.000.000	10,82

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase Pelayanan Terpadu Kecamatan yang terfasilitasi	%	83	25.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	dokumen	2	105.565.000	51.449.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
---	---	---	----	--------	--	--	---------	---	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APB Desa	laporan	17	10.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	tema	12	18.000	18.000									9.000	-	56,87	
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hasil musrenbang	laporan	12	7.450	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	58,2	83.175.000	83.175.000												0,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bintek untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparat pemerintah desa	orang	34	32.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	58,2	83.175.000	83.175.000	0	0	44,5	10.825.000				44,5	10.825.000	0,10	251,74
Program Pengembangan Kewilayahan	Prosentase Meningkatkan Tertib Administrasi Kewilayahan	%	100	52.705.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Peraturan Perkades	desa/kegiatan	17/7	15.825.000	15.825.000	-	-	3/7	8.165.000				3/7	8.165.000	58,82	54,07
Fasilitasi penerbitan perijinan dan	Jumlah Ijin yang diterbitkan	ijin	50	9.825.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/kegiatan	17/1	4.300.000	4.300.000	-	-	2/1	2.660.000				2/1	2.660.000	58,82	26,08

penanganan masalah perijinan																					
Pembi naan kelem bagaan	Jumla h kegiat an pembi naan kelem bagaan di Kecamatan Bantarbolang	ke giata n	1	20.800.000	Fasilitas ian pengelola an keuangan desa dan pendayag unaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitas ian pengelola an keuangan desa dan pendayag unaan aset desa	desa /kegiat an	171	4.300.000	4.300.000	-	-	-	-							0,00
Penyusunan databa se	Jumla h doku men penata an dan evalua si databa se kemis kinan yang disusu n.	ke giata n	1	17.780.000	Fasilitas ian pelaksana an tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah peserta pembinaa n uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	oran g/kegiat an	171	15.100.000	15.100.000	-	-	-	-							0,00

Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	jumlah penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	laporan	12	4.300.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/kegiatan	85/1	10.200.000	10.200.000	-	-	-	-							-	-	0,00	
					Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	desa/kegiatan	17/1	2.550.000	2.550.000	-	-	-	-										0,00
					Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	desa/kegiatan	17/1	8.500.000	8.500.000	-	-	-	-										0,00

Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/kegiatan	151	22.400,00	22.400,00	-	-	71	2.800,000					71	2.800,000	58,82	0,00
--	---	----------------	-----	-----------	-----------	---	---	----	-----------	--	--	--	--	----	-----------	-------	------

Tabel 2.2. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 Sampai Triwulan II

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Refocusing)	Satuan	Penetapan		Setelah Refocusing		Selisih		Triwulan II					
					Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%	Realisasi		Capaian		Status Capaian	
											Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)-(7)	(11) = (10)/(7)*100	(12)	(13)	(14) = (12)/(8)*100	(15) = (13)/(9)*100	(16)	(17)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78		78									
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor		2.919.807.000	10,72	2.543.467.000	(376.340.000)	(13)						
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	55	2.741.207.000	44,89	2.409.808.000	(331.399.000)	(12)						
4.11.4.11.6.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	dok	11	9.925.000	100	9.925.000	-	-	100	1.047.200	100	11		
4.11.4.11.6.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	2.445.000	3	2.445.000	-	-	1	1.047.200	33	43		
4.11.4.11.6.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-		

4.11.4.11.6.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	3.020.000	4	3.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	2.190.372.000	100	1.967.078.000	(223.294.000)	(10)	100	2.000.000	100	0		
4.11.4.11.06.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/bulan	17 orang/14 kali	2.185.892.000	0	-	(2.185.892.000)	(100)	0	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	2.000.000	1	2.000.000	-	-	1	2.000.000	-	100		

4.11.4.11.6.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dok	11	1.800.000	11	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	680.000	1	680.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	460.710.000	100	358.605.000	(102.105.000)	(22)	25,50	63.722.600	26	18		
4.11.4.11.6.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi bangunan kantor yang disediakan	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11 jenis/12 bulan	7.000.000	11/12	7.000.000	-	-	3/12	2.489.900	27	36		
4.11.4.11.6.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	3 jenis/12 bulan	278.000.000	3/12	278.000.000	-	-	1/12	52.191.500	33	19		
4.11.4.11.6.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	buku	30	8.747.000	30	8.747.000	-	-	8	2137200	27	24		
4.11.4.11.6.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	2 jenis/12 bulan	3.000.000	2/12	3.000.000	-	-	1/12	500.000	50	17		

4.11.4.11. 6.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	58.913.000	252	37.829.000	(21.084.000)	(36)	63	6.404.000	25	17		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibeli	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	4	105.050.000	100	24.029.000	(81.021.000)	(77)	-	-	-	-		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	81.050.000	2	29.000	(81.021.000)	(100)	-	-	-	-		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	24.000.000	2	24.000.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11. 6.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	jenis	3	221.400.000	100	246.600.000	25.200.000	11	26,74	41.479.000	27	17		
4.11.4.11. 6.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	5.400.000	0	-	(5.400.000)	(100)	150	2.450.000	-	-		
4.11.4.11. 6.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening/bulan	3/12	31.200.000	0	-	(31.200.000)	(100)	1/12	4.029.000	33	-		

4.11.4.11. 6.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM non ASN yang dibayar	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	org/ bulan	14/12	184.800.000	14/12	210.000.000	25.200.000	14	14/12	35.000.000	100	17		
4.11.4.11. 06.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	44	232.655.000	100	163.705.000	(68.950.000)	(30)	32,61	51.001.200	33	31		
4.11.4.11. 06.01.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	8	60.700.000	10	60.700.000	-	-	3	20.126.200	30	33		
4.11.4.11. 06.01.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	25.000.000	32	25.000.000	-	-	11	10.800.000	34	43		
4.11.4.11. 06.01.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	3/1.308	126.880.000	3	57.930.000	(68.950.000)	(54)	-	-	-	-		
4.11.4.11. 06.01.09.1 1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	1/200	20.075.000	1	20.075.000	-	-	1	20.075.000	100	100		

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	43,33	41.390.000	100	41.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	jenis	1	12.240.000	100	12.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.15.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah monitoring PBB yang dilaksanakan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	kali	6	12.240.000	6	12.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Aktivitas Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	jenis	2	29.150.000	100	29.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah pengajuan izin non usaha yang diterbitkan	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	ijin	650	11.550.000	650	11.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.18.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS yang disusun	dok	17	17.600.000	17	17.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-

	dengan non perizinan															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	70	69.180.000	100	69.180.000	-	-				0		
4.11.4.11.6.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Aktivitas Koordinasi Kegiatan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	jenis	2	34.650.000	100	29.450.000	(5.200.000)	(15)	33,33	20.750.000	33	70		
4.11.4.11.6.19.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	kegiatan	1	29.450.000	1	29.450.000	-	-	1	20.750.000	100	70		
4.11.4.11.6.19.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	kegiatan	2	5.200.000	0	-	(5.200.000)	(100)	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	jenis	1	34.530.000	1	10.060.000	(24.470.000)	(71)	-	-	-	-		

4.11.4.11.6.21.01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	12	34.530.000	12	-	(34.530.000)	(100)	-	-	-	-		
	PROGRAM KOORDINASI KENTENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pemenuhan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	15.520.000	24,5	15.520.000	-	-	100	15.520.000	408	100		
4.11.4.11.6.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis Aktivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	jenis	1	15.520.000	100	15.520.000	-	-	100	15.520.000	100	100		
4.11.4.11.6.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	15.520.000	34	15.520.000	-	-	34	15.520.000	100	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	123.565.000	100	69.449.000	(54.116.000)	(44)	0	0	0	0		

4.11.4.11.6.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jenis Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	jenis	2	123.565.000	100	69.449.000	(54.116.000)	(44)	0	0	0	0		
4.11.4.11.6.27.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten, hari besar agama, festival budaya yang dilaksanakan	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	kegiatan	2	105.565.000	2	51.449.000	(54.116.000)	(51)			0	0		
4.11.4.11.6.27.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	kali	12	18.000.000	12	18.000.000	-	-			0	0		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintah desa yang baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	76	83.175.000	58,82	83.175.000	-	-						

4.11.4.11.6.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	jenis	8	83.175.000	58,82	83.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	kali	7,00	15.825.000	17/7	15.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	kali	17	4.300.000	17/1	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kali	17	4.300.000	17/1	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kali	17	15.100.000	17/1	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-

4.11.4.11.6.28.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	17	10.200.000	85/1	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	kali	17	2.550.000	17/1	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	kali	17	8.500.000	17/1	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	kali	17	22.400.000	15/1	22.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Realisasi capaian kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2021 sampai tahun 2021 sampai triwulan II.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, rata-rata capaian kinerja menunjukkan hasil **Sangat Tinggi** yaitu sebesar 50,83%. Begitu pula untuk rata-rata realisasi anggaran menunjukkan hasil **Sangat Tinggi** yaitu sebesar 51,72% seperti pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2021 Triwulan II UnsurKewilayahan

No	Program/Kegiatan	% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021 TW II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021 TW II	
		K	Rp	K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - SAKIP - Nilai IRB	50,25		ST	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Persentase pelayanan publik yang tersedia(%)	44,95	52	T	ST
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (%)	47,92	45	ST	T
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan(%)	50	50	ST	ST
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani(%)	50	50	ST	ST
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (%)	61,86	61,62	ST	ST
	Rata-rata	50,83	51,72	ST	ST

Keterangan : SR (sangat rendah), R (rendah), S (sedang), T (Tinggi), dan ST (sangat Tinggi)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Urusan Penunjang pada Kecamatan diprioritaskan pada peningkatan peran kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Secara keseluruhan program yang direncanakan adalah :

1) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan meningkatkan penyediaan data dan informasi pemerintahan yang dapat diakses masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan, yaitu pelayanan perijinan non usaha, pelaksanaan verval DTKS, pelayanan non perijinan dan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pada tahun 2021 ditargetkan pelayanan publik yang tersedia sebesar 80,77%.

2) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan berupa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdesa/kelurahan dan Musrenbangcam, mengoptimalkan dana kelurahan, dan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 87,96% masyarakat desa dan kelurahan aktif dalam pembangunan.

3) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Program ini bertujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum adalah koordinasi dengan Polsek dan Koramil,

menyelenggarakan pelatihan Linmas, melaksanakan monitoring penegakkan Perda dan Perbup.

4) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Program ini bertujuan untuk menangani potensi konflik sosial tingkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun upaya yang dilakukan berupa : (1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan menyelenggarakan peringatan hari besar nasional, (2) sosialisasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, (3) penanganan konflik sosial yang terkoordinasi dan sinergi antar stakeholder dan (4) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

5) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Program ini bertujuan untuk mewujudkan desa bertata kelola pemerintahan baik melalui kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun upaya yang dilakukan adalah : (1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, (3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa, (4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, (5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, (7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (8) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, (9) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, (10) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan (11) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2021

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiat an/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiat an/Sub Kegiatan (Perubahan)	Satuan	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perub ahan
					Penetapa n	Refocu sing	Perubaha n	Peneta pan	Refocu sing	Peruba han	Bertambah /(Berkuran g) (Rp)	%	Bertambah /(Berkuran g) (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78	78										
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor		10,72		2.919.8 07.000	2.543.4 67.000	2.543.4 67.000	376.340.00 0	87,1 1	376.340.00 0	87,1 1		
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	55	44,89		2.741.2 07.000	2.409.8 08.000	2.409.8 08.000	331.399.00 0	87,9 1	331.399.00 0	87,9 1		
4.11.4.11. 6.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evluaasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	dok	11	100		9.925.0 00	9.925.0 00	9.925.0 00	-	100, 00	-	100		
4.11.4.11. 6.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang tersusun	dok	3			2.445.0 00	2.445.0 00	2.445.0 00	-	100,0 0	-	100		

4.11.4.11.6.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	4		3.020.000	3.020.000	3.020.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		2.190.372.000	4.480.000	1.967.078.000	2.185.892.000	0,20	223.294.000	89,81		
4.11.4.11.06.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/bulan	17 orang/14 kali	17 orang/14 kali		2.185.892.000	-	1.962.598.000	2.185.892.000	0,00	223.294.000	89,785		

4.11.4.11.6.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	1		2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dok	11	11		1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	1		680.000	680.000	680.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		460.710.000	358.605.000	358.605.000	102.105.000	77,84	102.105.000	77,84		
4.11.4.11.6.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi bangunan kantor yang disediakan	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11 jenis/12 bulan	11/12		7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	3 jenis/12 bulan	3/12		278.000.000	278.000.000	278.000.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	buku	30	30		8.747.000	8.747.000	8.747.000	-	100,00	-	100		

4.11.4.11. 6.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	2 jenis/12 bulan						-	100,00	-	100		
					2/12			3.000.000	3.000.000	3.000.000						
4.11.4.11. 6.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	252		58.913.000	37.829.000	37.829.000	21.084.000	64,21	21.084.000	64,212		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibeli	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	4	100		105.050.000	24.029.000	24.029.000	81.021.000	22,87	81.021.000	22,87		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2			81.050.000	29.000	29.000	81.021.000	0,04	81.021.000	0,0358		
4.11.4.11. 6.07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2			24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	jenis	3	100		221.400.000	246.600.000	236.600.000	-25.200.000	111,38	-15.200.000	106,9		
4.11.4.11. 6.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	600	600	5.400.000	-	11.400.000	5.400.000	0,00	-6.000.000	211,11		

4.11.4.11. 6.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening/bulan	3/12		3/12			25.200.000	31.200.000	0,00	6.000.000	80,769		
4.11.4.11. 6.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM non ASN yang dibayar	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	org/bulan	14/12		14/12		184.800.000	210.000.000	210.000.000	25.200.000	113,64	-	25.200.000	113,64
4.11.4.11. 06.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	44	100			232.655.000	163.705.000	163.705.000	68.950.000	70,36	68.950.000	70,36	
4.11.4.11. 06.01.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	8	10			60.700.000	60.700.000	60.700.000	-	100,00	-	100	
4.11.4.11. 06.01.09.0 6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	32			25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100,00	-	100	
4.11.4.11. 06.01.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m ²	3/1.308	3			126.880.000	57.930.000	57.930.000	68.950.000	45,66	68.950.000	45,657	

4.11.4.11.06.01.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m ²	1/200	1		20.075.000	20.075.000	20.075.000	-	100,00	-	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	43,33	100		41.390.000	41.390.000	41.390.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	jenis	1	100		12.240.000	12.240.000	12.240.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.15.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah monitoring PBB yang dilaksanakan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	kali	6	6		12.240.000	12.240.000	12.240.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Aktivitas Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	jenis	2	100		29.150.000	29.150.000	29.150.000	-	100,00	-	100		

4.11.4.11. 6.18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah pengajuan izin non usaha yang diterbitkan	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	ijin	650						-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.18.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan verval DTKS yang disusun	dok	17	17					-	100,00	-	100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	70	100					-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Aktivitas Koordinasi Kegiatan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	jenis	2	100					-	170,62	-	170,6		
4.11.4.11. 6.19.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	kegiatan	1	1					-	100,00	-	100		

4.11.4.11. 6.19.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	kegiatan	2	2	2	5.200.000			5.200.000	0,00	5.200.000	0		
4.11.4.11. 6.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	jenis	1	1		34.530.000	-	10.060.000	34.530.000	0,00	24.470.000	29,13		
4.11.4.11. 6.21.01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	12	12	12	34.530.000		10.060.000	34.530.000	0,00	24.470.000	29,13		
	PROGRAM KOORDINASI KENTENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pemenuhan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan transtibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	24,5		15.520.000	15.520.000	15.520.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis Aktivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	jenis	1	100		15.520.000	15.520.000	15.520.000	-	100,00	-	100		

4.11.4.11. 6.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	34		15.520.000	15.520.000	15.520.000	-	100,00	-	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100		123.565.000	69.449.000	69.449.000	54.116.000	56,20	54.116.000	56,2		
4.11.4.11. 6.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jenis Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	jenis	2	100		123.565.000	69.449.000	69.449.000	54.116.000	56,20	54.116.000	56,2		

4.11.4.11. 6.27.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten, hari besar agama, festival budaya yang dilaksanakan	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	kegiatan	2	2	105.565.000	51.449.000	51.449.000	54.116.000	48,74	54.116.000	48,737		
4.11.4.11. 6.27.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kecamatan yang dilakanakan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	kali	12	12	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	100,00	-	100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintah desa yang baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	76	58,82	83.175.000	83.175.000	83.175.000	-	100,00	-	100		

4.11.4.11.6.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	jenis	8	58,82		83.175.000	83.175.000	83.175.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.28.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	kali	7,00	17/7		15.825.000	15.825.000	15.825.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.28.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	kali	17	17/1		4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.28.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kali	17	17/1		4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11.6.28.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kali	17	17/1		15.100.000	15.100.000	15.100.000	-	100,00	-	100		

4.11.4.11. 6.28.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	17	85/1		10.200.000	10.200.000	10.200.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.28.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	kali	17	17/1		2.550.000	2.550.000	2.550.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.28.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	kali	17	17/1		8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	100,00	-	100		
4.11.4.11. 6.28.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	kali	17	15/1		22.400.000	22.400.000	22.400.000	-	100,00	-	100		

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Kecamatan Bantarbolang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang tahun 2021 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantarbolang tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021.

Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Bantarbolang tahun 2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Bantarbolang, 6 September 2020


CAMAT BANTARBOLANG
Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19691128 199003 1 005

Tabel 2.1 PERSANDINGAN HASIL PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp) Penetapan	Anggaran (Rp) Refocusing	Realisasi								Capaian (%)		OPD		
											TW I		TW II		TW III		TW IV		Total			K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
KECAMATAN BANTARBOLANG																							
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran	bulan	12	498.797.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78													0	Kec.Bantarbolang	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	surat	600	38.550.000		Indeks Reformasi Birokrasi	skor	10,72	3.447.892.000	3.024.627.000		15.520.000		8.776.000							24.296.000		0,8
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	44,89	3.115.062.000	2.745.913.000													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor	jenis	3	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	9.925.000	9.925.000	100	1.047.200	0						100	1.047.200	100	10,55	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang diperpanjang pajaknya	unit	11	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	2.445.000	2.445.000	1	1.047.200	-	-					1	1.047.200	33,33	42,83	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	unit gedung	4	68.400.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000		-	-	-					0	-	-	0	
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun	jenis	16	18.823.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000		-	-	-					0	-	-	0	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak, jumlah penggandaan	lembar	30.876	8.569.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000		-	-	-					0	-	-	0	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	unit gedung	4	7.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1.115.000		-	-	-					0	-	-	0	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi								Capaian (%)		OPD		
											Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV			Total	
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan kelengkapan Kantor yang tersedia	jenis	1	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	3.020.000	3.020.000		-	-	-	-	-	-	0	-	-	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	1	2.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	2.190.372.000	1.967.078.000	100	2.000.000	48,5	996.510.136					149	998.510.136	149	50,76	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	jenis	2	3.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/bulan	17/14	2.185.892.000	1.962.598.000	0	-	17/14	995.583.536					17/14	995.583.536	100	50,73	
Penyediaan makanan dan minuman pegawai	Jumlah makanan dan minuman pegawai	jenis	3	124.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	-	-					1	2.000.000	100	100	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	kali	522	85.855.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dok	11	1.800.000	1.800.000		-	3	926.600					3	926.600	27,27	51,48	
Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	unit gedung	4	96.600.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	680.000	680.000		-	-	-					0	-	-	0	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	%	100	564.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	355.660.000	334.576.000	25,5	63.722.600	49	155.031.000					74,5	218.753.600	74,5	2501	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	unit	2	70.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11/12	7.000.000	7.000.000	3/12	2.489.900	3/12	3.505.000					6/12	5.994.900	54,55	85,64	
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan	jenis	3	10.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	3/12	278.000.000	278.000.000	1/12	52.191.500	1/12	126.973.000					2/12	179.164.500	66,67	64,45	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi								Capaian (%)		OPD		
											Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV			Total	
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	jenis	3	13.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	buku	30	8.747.000	8.747.000	8	2137200	15	4374000					23	6.511.200	76,67	74,44	
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	jenis	1	5.000.000																			
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	jenis	2	20.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	2/12	3.000.000	3.000.000	1/12	500.000	1/12	1.250.000					2/12	1.750.000	100,00	58,33	
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	jenis	3	40.000.000																			
Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer / Laptop, Printer dan Perengkapannya	jenis	4	40.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	58.913.000	37.829.000	63	6.404.000	126	18.929.000					189	25.333.000	75,00	66,97	
Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	jenis	2	30.000.000							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan	%	100	105.050.000	24.029.000	0	-	100	24.000.000	-	-	-
Pengadaan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	jenis	3	10.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	81.050.000	29.000												0	
Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang tersedia	unit	5	15.000.000														2	24.000.000				
Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang di bangun	unit	1	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diperlancar pelaksanaan	%	100	221.400.000	246.600.000	26,7	41.479.000	51,1	118.992.000	-	-	-	-	77,8	160.471.000	77,8	65,07	
Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dibangun	unit	1	150.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	5.400.000	11.400.000	150	2.450.000	300	2.700.000					450	5.150.000	75	45,18	
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit gedung	1	20.000.000													1/12	4.029.000	1/12	11.292.000			
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit gedung	3	30.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	14/12	184.800.000	210.000.000	14/12	35.000.000	14/12	105.000.000					14/12	140.000.000	100	66,67	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi								Capaian (%)		OPD		
											Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV			Total	
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang dipelihara	unit	11	40.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	232.655.000	163.705.000	32,6	51.001.200	50	100.045.000					82,61	151.046.200	82,61	92,27	
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeleur kantor yang dipelihara	unit	15	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	10	60.700.000	60.700.000	3	20.126.200	5	28.968.000					8	49.094.200	80	80,88	
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapan	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	unit	21	10.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	25.000.000	25.000.000	11	10.800.000	17	13.147.000					28	23.947.000	87,5	95,79	
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara	jenis	3	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit	3	126.880.000	57.930.000			1	57.930.000					1	57.930.000	33,33	100,00	
Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang dipelihara	unit	1	8.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit	1	20.075.000	20.075.000	1	20.075.000							1	20.075.000	100,00	100,00	
Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dipelihara	unit	1	3.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	100	41.390.000	41.390.000			97,1	8.776.000					97	8.776.000	97,06	21,2	
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi	unit	1	-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	100	12.240.000	12.240.000	0	0	50	3.120.000					50	3.120.000	50	25,49	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang di rehabilitasi	unit	1	-	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	data	6	12.240.000	12.240.000	0	0	3	3.120.000					3	3.120.000	50,00	25,49	
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rehabilitasi	unit	1	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	100	29.150.000	29.150.000	0	0	47,1	5.656.000					47,06	5.656.000	47,06	19,4	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi										Capaian (%)		OPD
									Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV		Total		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan	%	100	13.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin	650	11.550.000	11.550.000	-	0	0	0							-	-	0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	laporan	1	10.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan vervel DTKS yang disusun	dok	17	17.600.000	17.600.000	-	0	8	5.656.000					8	5.656.000	47,06	32,14	
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD	laporan	2	-																			
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	3.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	69.180.000	69.180.000											-	-	0
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik & benar	%	100	40.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	%	100	34.650.000	59.120.000	33,3	20.750.000	0	0					33,33	20.750.000	33,33	35,1	
Penyusunan database perencanaan SKPD	Jumlah dokumen data base perencanaan yang disusun	dokumen	1	-	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang	1	29.450.000	29.450.000	1	20.750.000	-	-					1	20.750.000	100	70,46	
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	5	5.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	desa/kelurahan	2	5.200.000	29.670.000	-	-	-						-	-	-	0	

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi								Capaian (%)		OPD				
											Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV			Total		K	Rp.
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah laporan LPPDesa yang tersusun baik dan benar serta tepat waktu	laporan	17	5.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	100	123.565.000	69.449.000	0	0	28,6	9.000.000					28,57	9.000.000		10,82			
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase Pelayanan Terpadu Kecamatan yang terfasilitasi	%	83	25.000.000	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	dokumen	2	105.565.000	51.449.000												0			
Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDesa	laporan	17	10.000.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam	tema	12	18.000.000	18.000.000			4	9.000.000					4	9.000.000	33,33	50,00			
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hasil musrenbang	laporan	12	7.450.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	58,82	83.175.000	83.175.000												0			
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bintek untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparatur pemerintah desa	orang	34	32.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	58,82	83.175.000	83.175.000	0	0	44,8	10.825.000					44,75	10.825.000	0,1	251,7			

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi								Capaian (%)		OPD			
											Penetapan	Refocusing	TW I		TW II		TW III		TW IV			Total		
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
Program Pengembangan Wilayah	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Wilayah	%	100	52.705.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	desa/kegiatan	17/1	15.825.000	15.825.000	-	-	3/1	8.165.000	-	-	-	-	3/1	8.165.000	17,65	51,60		
Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan	Jumlah Ijin yang diterbitkan	ijin	50	9.825.000	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/kegiatan	17/1	4.300.000	4.300.000	-	-	2/1	2.660.000	-	-	-	-	2/1	2.660.000	11,76	61,86		
Pembinaan kelembagaan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan di Kecamatan Bantarbolang	kegiatan	1	20.800.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/kegiatan	17/1	4.300.000	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Penyusunan database	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun.	kegiatan	1	17.780.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/kegiatan	17/1	15.100.000	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	jumlah penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	laporan	12	4.300.000	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/kegiatan	85/1	10.200.000	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	desa/kegiatan	17/1	2.550.000	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	desa/kegiatan	17/1	8.500.000	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/kegiatan	15/1	22.400.000	22.400.000	-	-	7/1	2.800.000	-	-	-	-	7/1	2.800.000	46,67	12,50		

Tabel 2.2. Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 Sampai Triwulan II

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Penetapan)	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Refocusing)	Satuan	Penetapan		Setelah Refocusing		Selisih		Triwulan II					
					Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Realisasi		Capaian		Status Capaian	
											Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10) = (9)-(7)	(11) = (10)/(7)*100	12	13	(14) = (12)/(8)*100	(15) = (13)/(9)*100	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78		78									
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor		2.919.807.000	10,72	2.543.467.000	(376.340.000)	(13)						
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	55	2.741.207.000	44,89	2.409.808.000	(331.399.000)	(12)						
4.11.4.11.6.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	dok	11	9.925.000	100	9.925.000	-	-	100	1.047.200	100	11		
4.11.4.11.6.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	2.445.000	3	2.445.000	-	-	1	1.047.200	33,33	42,83		
4.11.4.11.6.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1.115.000	1	1.115.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	3.020.000	4	3.020.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	2.190.372.000	100	4.480.000	(2.185.892.000)	(100)	100	2.000.000	100	0		
4.11.4.11.06.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/ bulan	17 orang/14 kali	2.185.892.000	0	0	(2.185.892.000)	-	0	-	-	-		
4.11.4.11.6.02.02	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	2.000.000	1	2.000.000	-	-	1	2.000.000	100	100		

4.11.4.11.6.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dok	11	1.800.000	11	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	680.000	1	680.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	355.660.000	100	334.576.000	(21.084.000)	(6)	25,5	63.722.600	26	18		
4.11.4.11.6.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi bangunan kantor yang disediakan	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11 jenis/12 bulan	7.000.000	11 jenis/12 bulan	7.000.000	-	-	3/12	2.489.900	2,73	35,57		
4.11.4.11.6.06.02	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	3 jenis/12 bulan	278.000.000	3 jenis/12 bulan	278.000.000	-	-	1/12	52.191.500	33,33	18,77		
4.11.4.11.6.06.03	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	buku	30	8.747.000	30	8.747.000	-	-	8	2.137.200	26,67	24,434		
4.11.4.11.6.06.04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	2 jenis/12 bulan	3.000.000	2 jenis/12 bulan	3.000.000	-	-	1/12	500.000	50,00	16,67		
4.11.4.11.6.06.05	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	58.913.000	252	37.829.000	(21.084.000)	(36)	63	6.404.000	25,00	16,93		
4.11.4.11.6.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibeli	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	4	105.050.000	100	24.029.000	(81.021.000)	(77)	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	81.050.000	2	29.000	(81.021.000)	(100)	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.07.02	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	24.000.000	2	24.000.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	jenis	3	221.400.000	100	246.600.000	25.200.000	11	26,74	41.479.000	133,33	29,58		
4.11.4.11.6.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	5.400.000	0	0	5.400.000	-	150	2.450.000	-	-		
4.11.4.11.6.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening/bulan	3/12	31.200.000	0	0	31.200.000	-	1/12	4.029.000	33,33	12,91		
4.11.4.11.6.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM non ASN yang dibayar	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	org/ bulan	14/12	184.800.000	14/12	210.000.000	25.200.000	14	14/12	35.000.000	100	16,67		

11.4.11.06.01.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	44	232.655.000	100	163.705.000	(68.950.000)	-30	32,61	51.001.200	33	31		
1.4.11.06.01.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang ijinnya	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	8	60.700.000	10	60.700.000	2	-	3	20.126.200		33		
1.4.11.06.01.09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	25.000.000	32	25.000.000	-	-	11	10.800.000	34	43		
1.4.11.06.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	3/1.308	126.880.000	3	57.930.000	(68.950.000)	(54)	-	-	-	-		
1.4.11.06.01.09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	1/200	20.075.000	1	20.075.000	-	-	1	20.075.000	100	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	43,33	41.390.000	100	41.390.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	jenis	1	12.240.000	100	12.240.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.15.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah monitoring PBB yang dilaksanakan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	kali	6	12.240.000	6	12.240.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Aktivitas Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	jenis	2	29.150.000	100	29.150.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.18.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah pengajuan izin non usaha yang diterbitkan	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	ijin	650	11.550.000	650	11.550.000	-	-	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.18.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS yang disusun	dok	17	17.600.000	17	17.600.000	-	-	-	-	-	-		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	70	69.180.000	100	69.180.000	-	-				0		
4.11.4.11.6.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Aktivitas Koordinasi Kegiatan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	jenis	2	34.650.000	100	29.450.000	-5.200.000	-15	33,33	20.750.000	33	70		

4.11.4.11.6.19.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	kegiatan	1	29.450.000	1	29.450.000	-	-	1	20.750.000	100	70		
4.11.4.11.6.19.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	kegiatan	2	5.200.000	0	-	-5.200.000	-100	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	jenis	1	34.530.000	1	10.060.000	-24.470.000	-71	-	-	-	-		
4.11.4.11.6.21.0	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	12	34.530.000	12	-	-34.530.000	-100	-	-	-	-		
	PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pemenuhan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat dicegah	%	100	15.520.000	24,5	15.520.000	-	-	100	15.520.000	408	100		
4.11.4.11.6.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis Aktivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	jenis	1	15.520.000	100	15.520.000	-	-	100	15.520.000	100	100		
4.11.4.11.6.23.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	15.520.000	34	15.520.000	-	-	34	15.520.000	100	100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	123.565.000	100	69.449.000	-54.116.000	-44	0	0	0	0		
4.11.4.11.6.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jenis Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	jenis	2	123.565.000	100	69.449.000	-54.116.000	-44	0	0	0	0		

4.11.4.11.6.27.0	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten, hari besar agama, festival budaya yang dilaksanakan	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	kegiatan	2	105.565.000	2	51.449.000	-54.116.000	-51	-	-	0	0		
4.11.4.11.6.27.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kecamatan yang dilakanakan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	kali	12	18.000.000	12	18.000.000	-	-	-	-	0	0		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintah desa yang baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	76	83.175.000	58,82	83.175.000	-	-						
4.11.4.11.6.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	jenis	8	83.175.000	58,82	83.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	kali	17	15.825.000	17	15.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	kali	17	4.300.000	17	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kali	17	4.300.000	17	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kali	17	15.100.000	17	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	kali	17	10.200.000	85/1	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-

4.11.4.11.6.28.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	kali	17	2.550.000	17	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	kali	17	8.500.000	17	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.4.11.6.28.14	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	kali	17	22.400.000	15	22.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2021

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Anggaran			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
		(Penetapan)	(Perubahan)		Penetapan	Refocusing	Perubahan	(Rp)			Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
		6	7					8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78	78										
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor		10,72		2.919.807.000	2.543.467.000	2.543.467.000	376.340.000	87,11	376.340.000	87,11		
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	skor	55	44,89		2.741.207.000	2.409.808.000	2.409.808.000	331.399.000	87,91	331.399.000	87,91		
4.11.4.11.6.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	dok	11	100		9.925.000	9.925.000	9.925.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	3		2.445.000	2.445.000	2.445.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1		1.115.000	1.115.000	1.115.000		100		100		
4.11.4.11.6.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	4		3.020.000	3.020.000	3.020.000		100		100		
4.11.4.11.6.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		2.190.372.000	4.480.000	1.967.078.000	2.185.892.000	0,2	223.294.000	89,81		
4.11.4.11.6.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	org/ bulan	17 orang/14 kali			2.185.892.000	-	1.962.598.000	2.185.892.000	0	223.294.000	89,785		
4.11.4.11.6.02.02	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	1		2.000.000	2.000.000	2.000.000		100		100		
4.11.4.11.6.02.03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	dok	11	11		1.800.000	1.800.000	1.800.000		100		100		
4.11.4.11.6.02.04	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	1		680.000	680.000	680.000		100		100		
4.11.4.11.6.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Aktivitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		460.710.000	358.605.000	358.605.000	102.105.000	77,84	102.105.000	77,84		
4.11.4.11.6.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi bangunan kantor yang disediakan	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis/bulan)	jenis/bulan	11 jenis/12 bulan	11-Des		7.000.000	7.000.000	7.000.000		100		100		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Anggaran			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
		(Penetapan)	(Perubahan)		Penetapan	Refocusing	Perubahan	(Rp)			Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%		
								Penetapan	Refocusing	Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.11.4.11.6.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis/bulan	3 jenis/12 bulan	03-Des		278.000.000	278.000.000	278.000.000	-	100		100		
4.11.4.11.6.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	buku	30	30		8.747.000	8.747.000	8.747.000	-	100		100		
4.11.4.11.6.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang disediakan	Jenis surat kabar yang tersedia	Jenis/bulan	2 jenis/12 bulan	02-Des		3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100		100		
4.11.4.11.6.06.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan rapat koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	252	252		58.913.000	37.829.000	37.829.000	21.084.000	64,21	21.084.000	64,212		
4.11.4.11.6.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibeli	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	4	100		105.050.000	24.029.000	24.029.000	81.021.000	22,87	81.021.000	22,87		
4.11.4.11.6.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2	2		81.050.000	29.000	29.000	81.021.000	0,04	81.021.000	0,0358		
4.11.4.11.6.07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	2	2		24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	100		100		
4.11.4.11.6.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Jenis	3	100		221.400.000	246.600.000	236.600.000	-25.200.000	111,38	-15.200.000	106,9		
4.11.4.11.6.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang dikirim dengan baik	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	600	600	600	5.400.000	-	11.400.000	5.400.000	0	-6.000.000	211,11		
4.11.4.11.6.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening/bulan	03-Des	03-Des	03-Des	31.200.000	-	25.200.000	31.200.000	0	6.000.000	80,769		
4.11.4.11.6.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah SDM non ASN yang dibayar	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	org/ bulan	14-Des	14-Des		184.800.000	210.000.000	210.000.000	-25.200.000	113,64	-25.200.000	113,64		
11.4.11.06.01.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	unit	44	100		232.655.000	163.705.000	163.705.000	68.950.000	70,36	68.950.000	70,36		
11.4.11.06.01.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan diperpanjang jennya	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	8	10		60.700.000	60.700.000	60.700.000	-	100		100		
11.4.11.06.01.09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	32	32		25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	100		100		
11.4.11.06.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	3/1.308	3		126.880.000	57.930.000	57.930.000	68.950.000	45,66	68.950.000	45,657		
11.4.11.06.01.09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit/m2	1/200	1		20.075.000	20.075.000	20.075.000	-	100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	43,33	100		41.390.000	41.390.000	41.390.000	-	100		100		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Anggaran			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
		(Penetapan)	(Perubahan)		Penetapan	Refocusing	Perubahan	(Rp)			Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%		
								Penetapan	Refocusing	Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.11.4.11.6.15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	jenis	1	100		12.240.000	12.240.000	12.240.000		100		100		
4.11.4.11.6.15.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah monitoring PBB yang dilaksanakan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	kali	6	6		12.240.000	12.240.000	12.240.000		100		100		
4.11.4.11.6.18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Aktivitas Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Kepada Camat Yang Dilaksanakan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	jenis	2	100		29.150.000	29.150.000	29.150.000		100		100		
4.11.4.11.6.18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah pengajuan izin non usaha yang diterbitkan	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	ijin	650	650		11.550.000	11.550.000	11.550.000		100		100		
4.11.4.11.6.18.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan verbal DTKS yang disusun	dok	17	17		17.600.000	17.600.000	17.600.000		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	70	100		69.180.000	69.180.000	69.180.000		100		100		
4.11.4.11.6.19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Aktivitas Koordinasi Kegiatan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/Kelurahan + Kecamatan)	jenis	2	100		34.650.000	59.120.000	59.120.000	-24.470.000	170,62	-24.470.000	170,6		
4.11.4.11.6.19.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	kegiatan	1	1		29.450.000	29.450.000	29.450.000		100		100		
4.11.4.11.6.19.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	kegiatan	2	2	2	5.200.000			5.200.000	0	5.200.000	0		
4.11.4.11.6.21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Jenis Aktivitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	jenis	1	1		34.530.000	-	10.060.000	34.530.000	0	24.470.000	29,13		
4.11.4.11.6.21.01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan rakor lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	kali	12	12	12	34.530.000		10.060.000	34.530.000	0	24.470.000	29,13		
	PROGRAM KOORDINASI KENTENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase pemenuhan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan transtibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	24,5		15.520.000	15.520.000	15.520.000		100		100		
4.11.4.11.6.23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis Aktivitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya	jenis	1	100		15.520.000	15.520.000	15.520.000		100		100		
4.11.4.11.6.23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan linmas	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	34		15.520.000	15.520.000	15.520.000		100		100		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Anggaran			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
		(Penetapan)	(Perubahan)		Penetapan	Refocusing	Perubahan	(Rp)			Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
								Penetapan	Refocusing	Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100		123.565.000	69.449.000	69.449.000	54.116.000	56,2	54.116.000	56,2		
4.11.4.11.6.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jenis Aktivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	jenis	2	100		123.565.000	69.449.000	69.449.000	54.116.000	56,2	54.116.000	56,2		
4.11.4.11.6.27.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional, hari jadi kabupaten, hari besar agama, festival budaya yang dilaksanakan	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	kegiatan	2	2		105.565.000	51.449.000	51.449.000	54.116.000	48,74	54.116.000	48,737		
4.11.4.11.6.27.03	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi kecamatan yang dilanakan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	kali	12	12		18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	100	-	100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintah desa yang baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	76	58,82		83.175.000	83.175.000	83.175.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Aktivitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	jenis	8	58,82		83.175.000	83.175.000	83.175.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	kali	7	17-Jul		15.825.000	15.825.000	15.825.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	kali	17	17-Jan		4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kali	17	17-Jan		4.300.000	4.300.000	4.300.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.04	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kali	17	17-Jan		15.100.000	15.100.000	15.100.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas badan permusyawaratan desa yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa	kali	17	85/1		10.200.000	10.200.000	10.200.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang dilaksanakan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	kali	17	17-Jan		2.550.000	2.550.000	2.550.000	-	100	-	100		
4.11.4.11.6.28.11	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	kali	17	17-Jan		8.500.000	8.500.000	8.500.000	-	100	-	100		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Anggaran			Selisih Dengan Refocusing		Selisih Dengan Penetapan		OPD	Alasan Perubahan
		(Penetapan)	(Perubahan)		Penetapan	Refocusing	Perubahan	(Rp)			Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%	Bertambah /(Berkurang) (Rp)	%		
								Penetapan	Refocusing	Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.11.4.11.6.28.1	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	kali	17	15-Jan		22.400.000	22.400.000	22.400.000	-	100		100		